



Strategi Ketahanan Pangan Provinsi Riau: Dampak Sosio-Ekonomi Terhadap Masyarakat

Indra¹, Oman Sukmana², Wahyudi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: : Indrabpkad72@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

Dampak Sosio
Ekonomi.,
Kebijakan
Pemerintah,
Ketahanan Pangan

Latar Belakang: Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Republik Indonesia.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi program dan kebijakan ketahanan pangan di masyarakat petani kabupaten/kota Provinsi Riau serta dampak implementasi kebijakan dan program ketahanan pangan terhadap sosio ekonomi masyarakat di Provinsi Riau

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang evaluasi kebijakan pangan di Provinsi Riau dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Kesimpulan: Implementasi kebijakan dan strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau belum berjalan dengan baik, dikarenakan dalam implementasi kebijakan dan strategi tidak tepat sasaran sehingga Undang-undang No. 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan tidak terwujud

ABSTRACT

Background: Improving food security is one of the main programs of the government of the Republic of Indonesia.

Purpose: This study aims to analyze the evaluation of food security programs and policies in the regency/city farming community of Riau Province as well as the impact

of the implementation of food security policies and programs on the socio-economy of the community in Riau Province

Keywords:

Government
Policy, Food
Security, Socio-
Economic Impact.

Methods: The research method used is qualitative descriptive with the location of the research at the Riau Provincial Food, Food Crops and Horticulture Office. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies. Data analysis is carried out by data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Result: The results of this study are expected to provide a clear picture of the evaluation of food policy in Riau Province and its impact on the local community.

Conclusion: The implementation of policies and strategies of the Riau Province Food, Food Crops and Horticulture Service has not gone well, because the implementation of policies and strategies is not on target so that Law No. 18 of 2012 which mandates that food management is carried out to meet basic human needs that provide benefits in a fair, equitable, and sustainable manner has not been realized

PENDAHULUAN

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu fokus utama pemerintah Republik Indonesia (Rumawas, Nayoan, & Kumayas, 2021). Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar (215 juta orang), isu pangan senantiasa menjadi sensitif. Kekurangan dan kenaikan harga pangan seringkali memicu gejolak politik. Karena itu, pangan tidak hanya menjadi komoditas ekonomi tetapi juga komoditas politik yang memiliki dampak sosial yang luas (Pertanian, 2005); (Susanta, 2017). Ketahanan pangan telah menjadi komitmen nasional karena pengertiannya yang strategis dalam pembangunan nasional (Mansyur, 2022). Ketiga peran strategisnya termasuk akses terhadap pangan dan gizi yang memadai sebagai hak dasar manusia, peran penting pangan dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan ekonomi dan nasional (Sutrisno, 2022).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tetap menjadi andalan Indonesia, dianggap mampu memberikan pemulihan dalam menghadapi krisis di tanah air (Zebua, 2018). Sektor ini diakui sebagai sektor yang handal dengan potensi besar yang berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program Ketahanan Pangan Nasional, didukung oleh sejumlah pertimbangan (Isnaini, 2019). Pertama, Indonesia memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kedua, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Ketiga, diperlukannya penerapan teknologi tinggi dan pengetahuan untuk pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Keempat, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian. Kelima, pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan meningkatkan produksi domestik, sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga pangan global yang dapat menjadi mahal suatu saat.

Namun realitasnya, Indonesia masih bergantung pada impor beberapa jenis pangan dari luar negeri. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian akibat pertumbuhan populasi yang cepat dan peningkatan kebutuhan, serta berkurangnya jumlah tenaga kerja yang terampil di sektor pertanian. Masalah ini menjadi salah satu faktor utama yang mengurangi ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan terhadap impor pangan ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia (Pertahanan, 2015).

Provinsi Riau, dengan letak geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan. Namun, tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Riau tidaklah sedikit. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur dan teknologi pertanian sering kali menjadi penghambat utama.

Tabel 1. Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2023

| Peringkat | Provinsi | IKP | Peringkat | Provinsi | IKP |
|-----------|---------------------|-------|-----------|----------------------|-------|
| 1 | Bali | 87,65 | 18 | Sulawesi Tenggara | 74,96 |
| 2 | Jawa Tengah | 84,80 | 19 | Kalimantan Utara | 74,59 |
| 3 | DKI Jakarta | 83,80 | 20 | Sumatera Selatan | 73,82 |
| 4 | Sulawesi Selatan | 83,36 | 21 | Sulawesi Barat | 73,03 |
| 5 | Sumatera Barat | 83,22 | 22 | Aceh | 72,96 |
| 6 | DI Yogyakarta | 83,17 | 23 | Bengkulu | 72,27 |
| 7 | Jawa Timur | 82,46 | 24 | Kalimantan Barat | 72,20 |
| 8 | Jawa Barat | 82,19 | 25 | Jambi | 72,17 |
| 9 | Gorontalo | 81,63 | 26 | Nusa Tenggara Timur | 71,25 |
| 10 | Lampung | 81,56 | 27 | Kep. Bangka Belitung | 71,14 |
| 11 | Kalimantan Selatan | 81,26 | 28 | Kalimantan Tengah | 68,90 |
| 12 | Kalimantan Timur | 79,29 | 29 | Riau | 68,68 |
| 13 | Banten | 78,71 | 30 | Kep. Riau | 65,10 |
| 14 | Sulawesi Utara | 77,32 | 31 | Maluku | 64,37 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 76,51 | 32 | Maluku Utara | 62,34 |
| 16 | Sumatera Utara | 75,97 | 33 | Papua Barat | 47,95 |
| 17 | Sulawesi Tengah | 75,83 | 34 | Papua | 42,27 |

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Berdasarkan peringkat IKP Provinsi, lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (87,65), Jawa Tengah (84,80), DKI Jakarta (83,80), Sulawesi Selatan (83,36) dan Sumatera Barat (83,22). Sedangkan lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (42,27), Papua Barat (47,95), Maluku Utara (62,34), Maluku (64,37), dan Kepulauan Riau (65,10). Sedangkan IKP provinsi Riau hanya berada satu tingkat di atas provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Riau merupakan provinsi kedua terkaya setelah Kalimantan Timur, yang kaya akan sumber daya alam. Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi penghasil utama komoditas pertanian dan perkebunan di Indonesia, dihadapkan pada tantangan besar dalam

menjaga ketahanan pangan. Transformasi ekonomi dan urbanisasi yang cepat membawa dampak signifikan terhadap struktur agraris dan keberlanjutan sistem pangan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan ketahanan pangan di Provinsi Riau tidak hanya penting bagi ketersediaan pangan, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

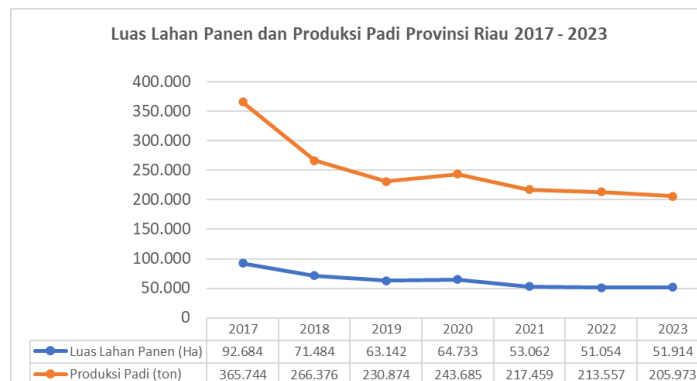
Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Riau menjadi hal yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Riau pada tahun 2021 masih berada di angka 84,1 dan angka ini masih di bawah angka skor PPH Nasional sebesar 86,3.

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Riau 2022–2023

| Uraian/ Periode Waktu | 2022 | 2023 | Perkembangan 2023 thd 2022 | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | | Absolut | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Luas Panen (Ribu Hektare) | | | | |
| Januari–April | 25,00 | 21,51 | -3,49 | -13,94 |
| Mei–Agustus | 12,02 | 17,09 | 5,07 | 42,14 |
| September–Desember | 14,03 | 13,31 | -0,72 | -5,14 |
| Januari–Desember | 51,05 | 51,91 | 0,86 | 1,68 |
| Produksi Padi (Ribu Ton GKG) | | | | |
| Januari–April | 105,48 | 86,55 | -18,93 | -17,95 |
| Mei–Agustus | 50,66 | 66,84 | 16,19 | 31,96 |
| September–Desember | 57,42 | 52,58 | -4,84 | -8,43 |
| Januari–Desember | 213,56 | 205,97 | -7,58 | -3,55 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024

Produksi padi di Provinsi Riau sepanjang bulan Januari hingga Desember 2023 mencapai sekitar 205,97 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 7,58 ribu ton GKG (3,55 persen) dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 213,56 ribu ton GKG. Produksi padi tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan Februari, mencapai 32,46 ribu ton GKG, sedangkan produksi terendah tercatat pada bulan Agustus, sekitar 9,62 ribu ton GKG.



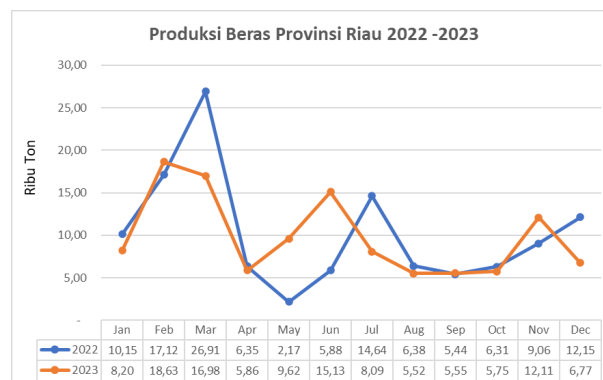
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Luas Lahan Panen Padi dan Produksi Padi di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan luas lahan panen dan produksi padi di Provinsi Riau pada tahun 2017 sampai dengan 2023 mengalami pertumbuhan yang negatif. Penurunan luas lahan panen padi di Provinsi Riau berbanding lurus dengan penurunan produksi pada dalam kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2023.

Produksi beras di Provinsi Riau selama tahun 2023 mengalami penurunan setiap bulannya. Produksi beras lokal Riau dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat Riau yang mencapai 670 ribu ron per tahun (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024).

Perkembangan sektor pertanian di Riau menunjukkan adanya potensi yang besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Program-program pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Di sisi lain, masyarakat Riau yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian memerlukan dukungan yang lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas dan adaptasi mereka terhadap perubahan yang terjadi.



Gambar 2. Produksi Beras di Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024

Apabila diperhatikan dari daerah kota atau kabupaten yang berada di Provinsi Riau, maka produksi beras tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dengan nilai

produksi sebesar 30.353 Ton pada tahun 2023, kemudian disusul oleh Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai produksi 19.657 Ton dan Kabupaten Siak dengan nilai produksi 15.205 Ton. Sedangkan daerah dengan produksi beras terkecil adalah Kota Pekanbaru. Namun jika dicermati, Tingkat produksi beras di Kabupaten Inderagiri Hilir pada tahun 2023 tersebut turun sebanyak 7,97% dibandingkan dengan produksi di tahun 2022. Hal yang serupa juga dialami oleh Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, dimana produksi beras daerah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produksi beras per kota dan kabupaten di Provinsi Riau ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Luas Produksi Beras di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2022–2023

| Kabupaten/Kota | Produksi Beras | | Perkembangan | |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---|
| | 2022 | 2023 | Absolut (Kol. [3] - Kol. [2]) | Relatif (%) (Kol. [4] x 100 / Kol. [2]) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kuantan Singingi | 12.259 | 14.748 | 2.489 | 20,31 |
| Inderagiri Hulu | 2.107 | 1.990 | -118 | -5,58 |
| Inderagiri Hilir | 32.983 | 30.353 | -2.630 | -7,97 |
| Pelalawan | 10.871 | 10.457 | -414 | -3,81 |
| Siak | 16.909 | 15.205 | -1.705 | -10,08 |
| Kampar | 6.694 | 6.102 | -591 | -8,84 |
| Rokan Hulu | 3.357 | 3.433 | 76 | 2,26 |
| Bengkalis | 8.705 | 9.733 | 1.028 | 11,82 |
| Rokan Hilir | 19.774 | 19.657 | -117 | -0,59 |
| Kepulauan Meranti | 3.521 | 3.806 | 285 | 8,10 |
| Pekanbaru | – | – | – | – |
| Dumai | 5.381 | 2.723 | -2.658 | -49,39 |
| RIAU | 122.561 | 118.209 | -4.353 | -3,55 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024

Permasalahan Penelitian

Pemerintah daerah provinsi Riau telah berupaya meningkatkan produksi beras daerah melalui berbagai program dan kebijakan, antara lain dengan mendorong gerakan daerah serentak memperluas areal tanam padi, menyediakan infrastruktur pertanian memadai dan menggunakan bibit bermutu untuk mendukung ketahanan pangan di daerah. Namun produksi pangan lokal khususnya beras hanya mampu memenuhi 17,64% kebutuhan konsumsi masyarakat di Riau. Hal ini mengakibatkan Riau masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan beras dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi.

Saat ini, di Riau terjadi pergeseran fungsi lahan untuk komoditas yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti perkebunan kelapa sawit. Produksi padi di Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama saat musim kemarau yang panjang dan sistem irigasi yang kurang baik, yang menjadi hambatan dalam pertanian padi.

Sejak tahun 2011, luas lahan sawah di Riau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Alih fungsi lahan menjadi tren di daerah ini, yang memicu kekhawatiran akan kehilangan lahan sawah dalam beberapa tahun mendatang. Perubahan ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan yang meningkat. Banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit karena dianggap lebih menguntungkan oleh para petani (<https://lampungpro.com>).

Pemerintah Provinsi Riau pada periode 2020-2024 mengalihkan perhatian utama mereka ke sektor pertanian, sesuai dengan misi Gubernur Riau ketiga untuk "mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing." Dalam konteks ini, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau memainkan peran kunci dalam memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan sektor pertanian untuk kemakmuran dan daya saing masyarakat. Melalui sinergi dengan visi dan misi ini, dinas tersebut bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan (Mariyani, Prasmatiwati, & Adawiyah, 2018). Terkait dengan kebijakan dalam menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi Riau berupaya memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yakni Riau harus bisa memenuhi kebutuhan pangan sebesar 50 persen pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Riau mendorong program ketahanan pangan di 12 kabupaten/kota di seluruh provinsi dengan berbagai inisiatif, seperti meningkatkan penyediaan pangan, produktivitas pertanian, indeks pertanian, serta pengawasan pertanian pangan yang dilakukan dengan melibatkan korporasi. Mereka juga memanfaatkan lahan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk menanam jagung, ubi kayu, sayuran, buah-buahan, dan jenis tanaman lainnya.

Berikut adalah beberapa strategi yang diimplementasikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau untuk menjaga ketahanan pangan:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan penggunaan pangan lokal sebagai pengganti beras, dengan memanfaatkan sumber karbohidrat seperti jagung, sagu, ubi kayu, pisang, kentang, talas ungu, dan lain-lain yang sesuai dengan komoditas lokal di setiap wilayah.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini bertujuan menjaga ketahanan pangan dengan membuat peta kerawanan pangan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk mengidentifikasi daerah yang masih rawan pangan atau sudah tahan pangan.
3. Program Riau Bergerak Menanam Padi (Riau Bertani). Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi padi di Riau minimal 50% pada tahun 2024 (Kusnadi, Info Riau, 2021). Pelaksanaan program ini mencakup beberapa aspek, yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan indeks pertanaman, penerapan mekanisasi, dan penguatan kelembagaan. Peningkatan produktivitas berfokus pada peningkatan jumlah produksi per hektar dengan menggalakkan penggunaan benih unggul yang disalurkan ke kelompok tani untuk ditanam di lahan mereka masing-masing. Saat ini, setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau berupaya memiliki penangkar benih unggul. Upaya meningkatkan indeks pertanaman mencakup pengalihan lahan yang biasanya hanya ditanami sekali setahun menjadi dua kali setahun, yang secara otomatis akan meningkatkan luas panen dan produksi padi setiap tahunnya. Penerapan mekanisasi

bertujuan untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman dengan menggunakan peralatan pertanian yang memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat dibandingkan secara manual, sehingga meminimalkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Bantuan alat mesin pertanian diberikan kepada petani untuk efisiensi dalam penyelesaian tugas-tugas pertanian. Penguatan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian petani dalam mengelola hasil produksi pertanian dari awal hingga akhir proses. Ini termasuk penguatan kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD), yang memberikan kemudahan akses ke pemasok sarana produksi pertanian, akses pasar, serta pembinaan sumber daya manusia petani.

Namun dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut, masih ditemui kendala dan hambatan yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3. Permasalahan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Provinsi Riau

| No | Masalah Pokok | Indikator/ Parameter |
|----|---|--|
| 1 | Masih rendahnya ketahanan pangan masyarakat | Distribusi pangan belum diatur secara baik. Kuantitas ketersediaan pangan belum mencukupi. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perorangan masih kurang. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan. |
| 2 | Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan local | Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang. Penganekaragaman/ diversifikasi pangan masih terbatas. |
| 3 | Sumber Daya Manusia pertanian masih kurang | Terbatasnya kemampuan petani. Masih terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian. |
| 4 | Harga sarana produksi mahal dan harga komoditi pertanian rendah | Rata-rata petani tidak mempunyai lahan, hanya sebagai penggarap. Harga sarana dan prasarana pertanian yang tinggi. Harga produk pertanian yang fluktuatif. |
| 5 | Produksi pertanian belum maksimal | Tingginya ketergantungan import pangan. Rendahnya produktivitas komoditi pertanian. Rendahnya produksi komoditas pertanian. |
| 6 | Regulasi dibidang pertanian | Tekanan alih fungsi lahan pertanian. Lapangan usaha pertanian belum mampu menjadi sektor basis. |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2024

Setiap program dan kebijakan yang diambil tentu akan berdampak terhadap masyarakat, baik bagi masyarakat petani sebagai pelaku usaha pertanian dan perilaku konsumsi rumah tangga produk pertanian.

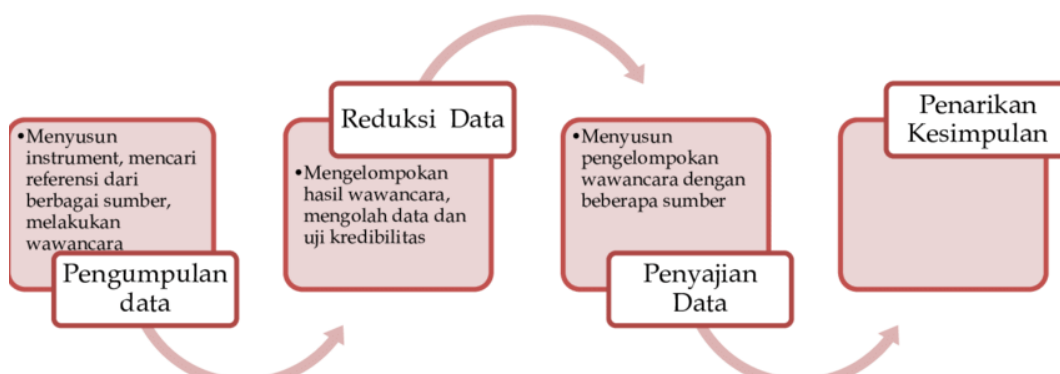
Penelitian sebelumnya oleh (Fauzi & Stiawati, 2024) telah melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai kebijakan dan program yang diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di berbagai daerah. Hasil evaluasi ini menunjukkan efektivitas dan kelemahan masing-masing kebijakan, seperti keberhasilan program diversifikasi pangan dalam mengurangi ketergantungan pada beras, namun juga mengungkapkan tantangan dalam distribusi dan penerapan di lapangan (Arif, Isdijoso, Fatah, & Tamyis, 2020). Selain itu, penelitian tersebut menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur dan teknologi dalam program peningkatan produktivitas pertanian, serta perlunya penguatan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan hasil program (Ariani & Suryana, 2023). Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi lokal, serta memperkuat kerangka kerja yang ada guna mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi program dan kebijakan ketahanan pangan di masyarakat petani kabupaten/ kota provinsi Riau dan menganalisis dampak implementasi kebijakan dan program ketahanan pangan provinsi Riau terhadap sosio ekonomi masyarakat di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa Dinas tersebut merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi tugas dan wewenang langsung oleh Gubernur Riau dalam upaya mencapai ketahanan pangan. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kasubag Perencanaan Program, sedangkan informan pendukung meliputi Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

Metode pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang obyek penelitian, sedangkan data dari literatur, peraturan perundang-undangan, proposal penelitian, media massa, dan sumber lain yang relevan dengan obyek penelitian juga dimanfaatkan. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai, menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif.



Gambar 3. Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana semua individu dalam suatu wilayah memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang bergizi dan aman untuk memenuhi kebutuhan diet mereka serta mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Ini mencakup aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, penggunaan pangan yang tepat, dan stabilitas pasokan pangan dari waktu ke waktu. Dalam upaya mencapai ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Riau telah merancang dan mengimplementasikan berbagai strategi yang komprehensif. Strategi-strategi ini termasuk diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras, peningkatan produksi pertanian melalui program seperti Riau Bertani, serta penanganan kerawanan pangan dengan pemetaan wilayah rentan dan penyediaan cadangan pangan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan bahwa pangan tersedia secara cukup dan terjangkau, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal melalui dukungan kepada petani dan usaha agribisnis. Melalui kombinasi strategi ini, pemerintah berupaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif, yang mampu menghadapi tantangan-tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan global. Peneliti menganalisis fenomena tersebut dengan merujuk pada teori William N. Dunn, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas (effectiveness) terkait dengan sejauh mana suatu pilihan mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari tindakan yang dilakukan. Untuk mencapai sebuah tujuan, diperlukan sebuah rencana dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau membuat rencana dalam bidang ketahanan pangan yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

| No. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan | Meningkatnya distribusi pangan, keamanan dan kualitas bahan pangan dan pemanfaatan pangan | Persentase keamanan pangan segar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| | | | Skor PPH Ketersediaan (Skor) | 86,03 | 87,03 | 87,06 | 87,06 | 87,06 |
| | | | Skor PPH Konsumsi (Skor) | 84,00 | 85,5 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 2. | Meningkatkan daya saing | Meningkatnya produksi | Produksi Padi (ton GKG) | 460.53 1,2 | 492.47 2,9 | 537.48 7,1 | 580.58 5,2 | 614.42 8,9 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| subsektor tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan pendapatan petani | Produksi Jagung (ton) | 35.053,7 | 36.016,8 | 36.979,9 | 37.943,0 | 38.906,1 | |
| | Produktivitas Padi | 39,60 | 39,76 | 40,31 | 40,44 | 40,73 | |
| | Produktivitas Jagung | 34,73 | 36,02 | 37,30 | 38,59 | 39,87 | |
| | Persentase petani yang menerapkan teknologi pasca panen | 53,20 | 53,70 | 54,20 | 54,70 | 55,20 | |
| | Persentase penyuluhan yang ditingkatkan kompetensinya | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 73 (BB) | 75 (BB) | 78 (BB) | 81 (A) | 83 (A) |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2024

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau berfokus pada peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Secara spesifik, tujuan jangka menengah ini mencakup peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, serta diversifikasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah. Sasaran lainnya termasuk pemberdayaan petani melalui program pelatihan dan bantuan teknis, peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern, serta penguatan sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Dinas ini juga berkomitmen untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan melalui praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam, serta mendorong kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan sektor pangan dan hortikultura di Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2022, diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET | REALISASI | %tase CAPAIAN | KATEGORI PENILAIAN |
|----|--------------------------------------|---|---------|-----------|---------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya sistem Ketahanan Pangan | Skor PPH Ketersediaan (skor) | 89.80 | 89.29 | 99.43 | Sangat Tinggi |
| | | Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) | 25.44 | 7.69 | 330.82 | Sangat Tinggi |
| | | Persentase peningkatan keamanan pangan segar(%) | 5.00 | 3.31 | 66.20 | Sedang |
| 2. | Meningkatnya produksi | Produksi Padi (ton GKG) | 313,213 | 213,557 | 68.18 | Sedang |
| | | Produksi Jagung | 38,049 | 9,876 | 25.95 | Sangat Rendah |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2022 terhadap target yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja tersebut, dapat diuraikan bahwa sasaran untuk setiap indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatkan Sistem Ketahanan Pangan

Meningkatnya sistem ketahanan pangan dapat diukur dengan 3 indikator kinerja utama yakni:

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan dengan target 89,8 skor dimana capaian pada tahun 2022 adalah 89,29 atau 99,43%. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan akan bahan pangan rumah tangga untuk wilayah Provinsi Riau pada tahun 2022 dapat terpenuhi penyediaannya baik dari sisi produksi maupun dari pasokan luar Provinsi. Sementara itu capaian kinerja Provinsi untuk skor pola pangan harapan tahun 2022 sebesar 89,29 ini masih dibawah target nasional nasional yakni 92,8.
2. Persentase wilayah rentan pangan dengan target pada tahun 2022 sebesar 25,44% dapat dicapai sebesar 7,69% berdasarkan angka olahan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Adapun Capaian untuk persentase penurunan wilayah rentan pangan adalah 330,82%.

Formulasi perhitungan:

Jumlah kecamatan yang rentan pangan dibagi jumlah kecamatan di Provinsi Riau dikali 100. Wilayah rentan pangan merujuk pada keadaan di mana daerah, masyarakat, atau rumah tangga mengalami kekurangan pangan pada waktu tertentu, sehingga tidak mencukupi standar kebutuhan fisiologis untuk pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Capaian kinerja dikategorikan sangat tinggi dimana dari target 42 kecamatan (25,44%) wilayah yang rentan pangan di Provinsi Riau turun menjadi 13 kecamatan (7,69%) wilayah yang rentan pangan. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan pangan di suatu wilayah tersebut sudah memenuhi standar kebutuhan

Masyarakat dan hanya 13 kecamatan atau 7,69% wilayah saja yang perlu penanganan untuk daerah rawan pangan.

3. Persentase peningkatan keamanan pangan segar dengan target pada tahun 2022 sebesar 5,00% dapat dicapai 3,31% atau 66,20 %.

Formulasi perhitungan :

Selisih persentase keamanan segar tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya dibagi persentase keamanan segar tahun sebelumnya dikali 100

Persentase keamanan pangan segar dihitung berdasarkan formulasi yang memperhitungkan 60% dari aktivitas Post Market (pengawasan produk setelah beredar di pasaran melalui pemeriksaan, inspeksi, sampling, dan pengujian), dan 40% dari aktivitas Pre Market (pengawasan dan penilaian terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk sebelum beredar di pasaran melalui proses sertifikasi). Pada tahun 2022 capaian keamanan pangan segar mengalami peningkatan dari 92,37% menjadi 95,43%. Kondisi ini dapat dijelaskan dimana pada posisi post market dari 35 sample yang diuji hanya 2 sample yang tidak lulus dan 33 sample yang negatif (lulus), maka capaian untuk post market adalah 94,29%. Sedangkan pada posisi pre market, dari jumlah sampel pangan yang diuji yakni 105 sampel terdapat 7 sampel yang bermasalah atau tidak lolos uji. Jadi sampel yang lulus uji dan diterbitkan sertifikatnya adalah 98 sampel. Berdasarkan range persentase sertifikat/registrasi yang diterbitkan selama setahun maka capaian pre market termasuk pada 50%, sehingga sesuai perhitungan bobot dari capaian persentase keamanan pangan segar (post market dan pre market) menjadi 95,43%. Sedangkan untuk persentase peningkatannya dari target 5% dapat dicapai 3,31% atau 66,20 % atau kategori sedang. Namun jika dibandingkan dengan target nasional capaian kinerja Provinsi untuk persentase keamanan pangan segar (post market dan pre market) menjadi 86,55%. Hal ini disebabkan karena target nasional lebih tinggi dari pada target provinsi.

Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Peningkatan produksi Tanaman Pangan dan hortikultura yang diukur dengan indikator kinerja utama yakni :

1. Produksi padi tahun 2022 dengan target 313.213 ton GKG, berdasarkan angka tetap (Berita Resmi Statistik) dapat terealisasi sebesar 213.557 ton GKG. Capaian produksi padi ini jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2022 dikategorikan sedang yakni mencapai 68,18%.

Formulasi perhitungan :

Jumlah produksi padi merupakan hasil perkalian dari 2 variabel yakni luas panen padi dan produktivitas tanaman padi. Salah satu yang menyebabkan rendahnya capaian produksi padi tahun 2022 adalah disebabkan oleh menurunnya angka luas tanam padi. Hal ini tentunya berakibat pada penurunan angka luas panen, Dimana berdasarkan angka tetap BPS Provinsi Riau luas panen padi tahun 2022 adalah seluas 51.054 Ha.

Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur lahan (jaringan irigasi dan tanggul) yang belum memadai atau tidak dapat berfungsi secara optimal (banyak yang rusak), sehingga upaya untuk penanaman 2 kali dalam setahun (IP 200) belum dapat terpenuhi secara maksimal. Pada beberapa lokasi yang tanggulnya rusak menyebabkan intrusi air laut (masuknya air laut ke daratan) serta terjadinya abrasi, sehingga lahan yang ada disekitarnya tidak bisa ditanami. Penyebab kedua adalah kondisi alat dan mesin pertanian (alsintan)

yang belum mencukupi untuk melakukan percepatan tanam. Terakhir, pola pertanian pada masyarakat yang masih bersifat subsisten yang orientasinya masih untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

- Produksi jagung dengan target 38.049 ton, capaian produksi jagung tahun 2022 adalah 9.875,50 ton atau 25,95%. Capaian ini termasuk kategori penilaian sangat rendah jika dibandingkan dengan target produksi tahun 2022 yang sudah ditetapkan.

Formulasi perhitungan:

Jumlah produksi jagung merupakan hasil perkalian dari 2 variabel yakni luas panen jagung dan produktivitas tanaman jagung. Rendahnya capaian produksi komoditi jagung ini disebabkan karena terjadinya penurunan luas tanam dan luas panen pada komoditi jagung yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena pengembangan komoditi jagung sangat tergantung pada program pemerintah pada tahun berkenaan. Disamping itu untuk komoditi jagung belum ada mempunyai lahan baku khusus komoditi jagung. Pada tahun 2022 dari Dana APBN tidak terdapat alokasi kegiatan pengembangan jagung untuk Provinsi Riau, sedangkan dari sumber dana APBD dialokasikan hanya seluas 350 ha. Dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat penurunan yang signifikan dalam pengembangan lahan untuk jagung. Pada tahun 2021, luas lahan yang dikembangkan mencapai 6.540 hektar dengan pendanaan dari APBN dan APBD, yang sangat berdampak pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Kontribusi produksi jagung di Provinsi Riau terhadap target produksi nasional sangat kecil yakni 0,038%, dimana capaian produksi jagung tahun 2022 hanya 9.875,50 ton sementara target nasional untuk produksi jagung adalah 26 juta ton.

Untuk mengetahui sejauh mana target kinerja yang tertuang dalam dokumen rencana strategis sudah dicapai sampai dengan tahun 2022, maka dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya Adapun capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| N O. | TUJUAN | INDIKAT OR TUJUAN/SASARAN | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|------|---|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| | | | TARGET | REALISASI | %tase CAPAIAN | TARGET | REALISASI | %tase CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya distribusi pangan, keamanan dan kualitas bahan pangan dan pemanfaatan pangan | Persentase keamanan pangan segar | 70 | 92.37 | 131.96 | 75 | 95.43 | 127.24 |
| | | Skor PPH Ketersediaan (Skor) | 87.03 | 89.87 | 103.26 | | | |
| | | Skor PPH Konsumsi (Skor) | 85.5 | 85 | 99.42 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| Meningkatnya sistem Ketahanan Pangan | Skor PPH Ketersediaan (skor) | 87.03 | 89.87 | 103.26 | 89.80 | 89.29 | 99.43 |
| | Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) | | | | 25.44 | 7.69 | 330.82 |
| | Persentase peningkatan keamanan pangan segar(%) | | | | 5.00 | 3.31 | 66.20 |
| 2. Meningkatkan produksi | Produksi Padi (ton GKG) | 492,473 | 223,399 | 45.36 | 313,213 | 213,557 | 68.18 |
| | Produksi Jagung | 36,017 | 19,144 | 53.15 | 38,049 | 9,875 | 25.95 |
| | Produktivitas Padi (Kw/ Ha) | 36.02 | 35.31 | 98.03 | | | |
| | Produktivitas Jagung (Kw/ Ha) | 36.02 | 35.31 | 98.03 | | | |
| | Persentase petani yang menerapkan teknologi pasca panen | 53.70 | 46.88 | 87.30 | | | |
| | Persentase penyuluhan yang ditingkatkan kompetensinya | 3.00 | 4.16 | 138.67 | | | |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Untuk menilai pencapaian kinerja tahun 2022 dalam kaitannya dengan target akhir dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024, perlu dilakukan perbandingan antara pencapaian tahun 2022 dengan target tersebut yang tercantum dalam tabel berikut..

Tabel 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2024

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET AKHIR RENSTRA (Tahun 2024) | CAPAIAN TAHUN 2022 | %tase CAPAIAN |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | Meningkatnya sistem Ketahanan Pangan | Skor PPH Ketersediaan (skor) | 96.00 | 89.29 | 93.01 |
| | | Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) | 21.30 | 7.69 | 276.98 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|---------|---------|--------|
| | | Persentase peningkatan keamanan pangan segar(%) | 85.00 | 95.43 | 112.27 |
| 2. | Meningkatnya produksi | Produksi Padi (ton GKG) | 436,203 | 213,557 | 48.96 |
| | | Produksi Jagung | 40,382 | 9,875.5 | 24.46 |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Data dalam Tabel 7 menunjukkan pencapaian indikator kinerja tahun 2022-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Dalam mencapai sistem ketahanan pangan, terdapat dua indikator yang telah melebihi target akhir Renstra, yaitu Persentase Wilayah Rentan Pangan dan Persentase Keamanan Pangan Segar. Namun, Indeks Ketahanan Pangan dan Indikator PPH Ketersediaan (Skor) masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Sasaran 2: Pada indikator jumlah produksi tanaman padi dan jagung tahun 2022, pencapaian masih jauh di bawah target akhir Renstra tahun 2024. Produksi padi baru mencapai 52,12%, sedangkan untuk jagung hanya mencapai 24,46%.

b. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan optimalitas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Program pertanian yang dirancang oleh pemerintah berlangsung selama lima tahun, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Program ini didanai melalui APBN dan APBD Provinsi Riau. Dalam menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Detail lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun 2022

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | Anggaran | | %tase Capaian |
|-----|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | Pagu | Realisasi | |
| 1. | Meningkatnya sistem Ketahanan Pangan | Skor PPH Ketersediaan (skor) | 1.254.440.544 | 1.083.100.768 | 86,34 |
| | | Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) | 448.092.284 | 263.001.436 | 58,69 |
| | | Persentase peningkatan keamanan pangan segar(%) | 319.546.285 | 285.315.715 | 89,29 |
| 2. | Meningkatnya produksi | Produksi Padi (ton GKG) | 60.130.896.243 | 54.707.690.884 | 90,98 |
| | | Produksi Jagung | | | |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Tabel 9. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | %tase CAPAIAN KINERJA | %tase PENYERAPAN ANGGARAN | %tase TINGKAT EFISIENSI |
|-----|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya sistem Ketahanan Pangan | Skor PPH Ketersediaan (skor) | 99.43 | 86.34 | 13.09 |
| | | Persentase Wilayah Rentan Pangan (%) | 330.82 | 8.69 | 272.13 |
| | | Persentase peningkatan keamanan pangan segar(%) | 66.2 | 89.29 | -23.09 |
| 2. | Meningkatnya produksi | Produksi Padi (ton GKG) | 68.18 | 90.98 | -2.55 |
| | | Produksi Jagung | 25.95 | | |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis 1, serapan anggaran secara keseluruhan yang mendukung sasaran Meningkatkan Sistem Ketahanan Pangan adalah 80,64%. Dari 3 indikator yang menjadi ukuran pencapaian target terdapat 2 indikator yang termasuk kategori sangat tinggi. Sedangkan 1 indikator yakni persentase peningkatan keamanan pangan segar termasuk kategori yang sedang. Ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah mampu mendukung pencapaian target yang ditetapkan.

Untuk sasaran strategis 2, penggunaan sumber daya yang mendukung setiap indikator tidak dapat dipisahkan, karena satu kegiatan dapat mendukung beberapa indikator sekaligus. Semua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Namun, dari analisis tabel efisiensi penggunaan sumber daya, serapan anggaran mencapai 90,98%, yang belum memadai untuk mencapai semua target yang ditetapkan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik terjadi ketika tujuan yang telah dicapai dianggap memadai dalam semua aspeknya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua program yang dirancang dan diimplementasikan sebagai kegiatan telah terealisasi sesuai dengan sarannya. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat tantangan terkait manajemen waktu. Untuk mengatasi masalah ini, Penyuluh Pertanian melakukan komunikasi yang intensif dengan kelompok tani sebagai target kegiatan.

d. Pemerataan

Pemerataan merujuk pada upaya untuk menyebarkan distribusi manfaat dari sebuah kebijakan. Dua kelompok utama yang relevan dalam kebijakan ini adalah:

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi penerima kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti, pemerataan distribusi manfaat dari program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sudah terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari fakta bahwa kelompok sasaran yang telah menerima bantuan pada tahun sebelumnya tidak lagi menerima bantuan pada tahun

berikutnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat merata manfaatnya kepada kelompok tani di Kabupaten/Kota.

e. Responsivitas

Responsivitas merujuk pada seberapa baik suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok tani yang menjadi sasaran kegiatan, didapatkan informasi bahwa mereka sangat menghargai bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Bantuan tersebut dianggap sangat berharga untuk mendukung kegiatan usaha tani mereka. Kelompok tani berharap agar pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan mereka dalam upaya meningkatkan produksi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Responsivitas kebijakan juga dapat diukur dari sejauh mana program-program yang diterapkan mampu memberikan solusi konkret atas masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Dalam konteks ini, bantuan dari pemerintah tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian petani dalam mengelola lahan mereka. Dukungan yang konsisten dari pemerintah memberikan keyakinan bahwa mereka dapat terus berkembang dan menghasilkan secara berkelanjutan. Selain itu, penghargaan atas responsivitas kebijakan ini juga tercermin dari kolaborasi yang erat antara pemerintah dan kelompok tani dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa depan yang lebih baik dalam sektor pertanian.

f. Analisis Dampak Sosio Ekonomi Pertanian dan Ketahanan Pangan

Analisis ini membahas beberapa aspek terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat petani di pedesaan (rural area) dan dampak kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal stabilisasi ketahanan pangan. Menurut penelitian Sitohang (2015) dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaruh Luas Lahan Panen Padi, Kondisi Jalan, dan Jumlah Konsumsi Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Provinsi Riau", ditemukan bahwa luas lahan panen padi dan jumlah konsumsi beras memiliki dampak yang penting terhadap ketahanan pangan di Provinsi Riau.

Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yang tercantum dalam Berita Resmi Statistik No.13/03/14/Th. XXV, 1 Maret 2024, luas panen padi pada periode Januari hingga Desember 2023 mencapai sekitar 51,91 ribu hektar, mengalami peningkatan sebesar 860 hektar (1,68 persen) dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 51,05 ribu hektar. Peningkatan luas panen padi terbesar terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan penambahan mencapai 1.309 hektar atau 27,13 persen. Sementara itu, penurunan luas panen padi terbesar tercatat di Kota Dumai, dengan penurunan mencapai 1.440 hektar atau 49,18 persen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Rahayu, Sukandar, Dadang (2017), Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2029, Provinsi Riau diperkirakan akan memiliki populasi sebanyak 8.496.500 orang. Konsumsi beras per kapita diproyeksikan mencapai 104,40 kilogram, dengan total kebutuhan konsumsi beras sekitar 887.044 ton. Luas lahan sawah diproyeksikan mencapai 32.696 hektar, sementara luas panen padi sawah diperkirakan mencapai 52.971 hektar. Produktivitas padi sawah

diproyeksikan mencapai 34,73 kuintal per hektar, menghasilkan produksi beras sekitar 107.627 ton. Tingkat kemandirian beras diproyeksikan mencapai 0,12.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau semakin bergantung pada impor pangan untuk mengatasi defisit pangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mencapai kemandirian dalam produksi padi-padian menjadi tantangan yang besar (Gevisioner, Febriamansyah, Ifdal, & Tarumun, 2015); (Ansori, 2021); (Sugiyanto, Nurhadi, & Pintakami, 2022).

Tabel 10. Luas Panen Padi di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/ Kota (hektare), 2022–2023

| Kabupaten/Kota | Luas Panen | | Produksi Padi | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kuantan Singingi | 4.826 | 6.135 | 21.361 | 25.698 |
| Indragiri Hulu | 924 | 902 | 3.672 | 3.467 |
| Indragiri Hilir | 13.821 | 14.307 | 57.471 | 52.889 |
| Pelalawan | 5.023 | 5.007 | 18.942 | 18.222 |
| Siak | 6.343 | 6.388 | 29.464 | 26.493 |
| Kampar | 2.72 | 2.532 | 11.663 | 10.633 |
| Rokan Hulu | 1.436 | 1.461 | 5.849 | 5.982 |
| Bengkalis | 3.703 | 3.813 | 15.168 | 16.960 |
| Rokan Hilir | 7.384 | 7.630 | 34.456 | 34.252 |
| Kepulauan Meranti | 1.948 | 2.250 | 6.135 | 6.632 |
| Pekanbaru | – | – | – | – |
| Dumai | 2.928 | 1.488 | 9.376 | 4.745 |
| Riau | 51.054 | 51.914 | 213.557 | 205.973 |

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2023

Pemenuhan kebutuhan pangan yang berasal dari luar Provinsi Riau memiliki dampak signifikan terhadap harga jual komoditas pangan di kalangan masyarakat setempat. Ketika harga pangan stabil dan terjangkau, masyarakat mampu meningkatkan konsumsi pangan mereka, mendukung tercapainya ketahanan pangan. Namun, jika harga pangan naik terlalu tinggi, daya beli masyarakat akan menurun, sehingga menghambat upaya pencapaian ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Faktor ini menegaskan bahwa fluktuasi harga rata-rata dari berbagai produk (inflasi) berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk mengakses barang dan jasa. Kenaikan harga pangan cenderung mengurangi konsumsi pangan, sementara penurunan harga dapat meningkatkan konsumsi pangan (Fajar, 2023; Firdauzi, 2021; Hardono, 2014). Analisis terhadap tujuh komoditas pangan utama di Provinsi Riau menunjukkan bahwa secara umum, harga pangan cenderung meningkat setiap tahun. Kenaikan harga tertinggi tercatat pada beras dengan laju tahunan mencapai 14,82%, diikuti oleh ikan asin 13,53%, gula pasir 12,66%, dan daging sapi 10,60%.

Pola konsumsi pangan penduduk di Provinsi Riau yang mengalami defisit pangan relatif mirip dengan pola konsumsi di daerah yang memiliki surplus pangan. Volume dan kualitas konsumsi pangan serta asupan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat pengetahuan, dan budaya masyarakat (Putranto & Taofik, 2014; Taenasah, Dasipah, & Gantini, 2024). Kualitas konsumsi pangan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh ketersediaan pangan berkualitas baik, tingkat pendapatan, harga beras, dan harga daging ayam. Jika ketersediaan pangan berkualitas baik dapat dijaga dan pendapatan masyarakat cukup tinggi, maka kualitas konsumsi pangan juga akan meningkat.

Menurut Badan Pangan Nasional (2023), Provinsi Riau masih memiliki tiga kabupaten yang rentan terhadap kekurangan pangan, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Kualitas konsumsi pangan penduduk di daerah-daerah rentan pangan di Provinsi Riau belum memadai. Permintaan pangan meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat, daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi, sementara produksi pangan terbatas sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah semakin tinggi. Situasi ini dapat meningkatkan kerentanan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi daerah (Heryanto & Nugraha, 2022). Mengingat kondisi aktual tersebut di Provinsi Riau, upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi, menambah nilai tambah, serta memilih, mengolah, dan menyajikan berbagai jenis pangan lokal, khususnya produk olahan dari sagu dan umbi-umbian. Saat ini, 19,7% penduduk Riau masih mengalami kekurangan asupan energi dan kurang variasi dalam konsumsi pangan mereka. Selain itu, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai sumber energi yang beragam dan bergizi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis sumber pangan, seperti beras, yang rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga. Melalui pembinaan dan fasilitasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di sekitar mereka. Peningkatan keterampilan dalam mengolah pangan lokal tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi baru yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan tingkat defisit konsumsi energi dan kurangnya variasi konsumsi pangan dapat diatasi secara efektif, menuju ketahanan pangan yang lebih baik di Provinsi Riau.
- 2) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang pangan, gizi, dan kesehatan (edukasi gizi). Edukasi gizi ini bertujuan untuk mengubah perilaku konsumsi pangan dan meningkatkan status gizi. Sayangnya, implementasi dari upaya ini masih terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Agar program edukasi gizi ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Upaya kolaboratif

ini harus mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga penyuluh, serta kampanye kesadaran yang terus-menerus di tingkat komunitas. Selain itu, penting untuk mengadaptasi materi edukasi gizi agar sesuai dengan konteks lokal dan budaya setempat, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk mengadopsi pola konsumsi pangan yang lebih sehat dan beragam, yang pada akhirnya akan meningkatkan status gizi dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

- 3) Melakukan advokasi kepada para pembuat kebijakan, karena dukungan politik dari mereka sangat penting untuk mewujudkan pola konsumsi pangan masyarakat yang sesuai dengan pola pangan yang diharapkan. Advokasi ini perlu dilakukan secara strategis dan terus-menerus, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyuarakan pentingnya kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi. Dalam proses ini, data dan bukti ilmiah tentang manfaat dan kebutuhan pola pangan yang sehat harus disajikan secara jelas kepada para pembuat kebijakan. Selain itu, dialog terbuka dengan komunitas dan organisasi masyarakat juga harus digalakkan untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat terwakili dalam kebijakan yang dibuat. Dengan dukungan politik yang kuat, berbagai program dan inisiatif terkait ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan, membawa manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan dan strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan sasaran dalam implementasi kebijakan dan strategi, sehingga Undang-undang No. 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan belum terwujud. Hal ini terlihat dari pencapaian sasaran meningkatnya sistem ketahanan pangan, di mana terdapat dua indikator yang sudah melebihi target akhir renstra yaitu Persentase wilayah rentan pangan dan Persentase keamanan pangan segar, sementara indikator indeks ketahanan pangan dan indikator PPH ketersediaan (Skor) masih di bawah target yang ditetapkan. Indikator jumlah produksi tanaman padi dan jagung juga masih jauh dari target akhir Renstra tahun 2024, dengan pencapaian untuk padi baru sebesar 52,12% dan jagung baru sebesar 24,46%. Kondisi ini disebabkan karena lebih banyak penerima manfaat kebijakan atau program tersebut berasal dari wilayah yang aman pangan dibandingkan dengan wilayah rentan pangan.

Dalam implementasi kebijakan dan strategi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu: 1) Kurangnya pengawasan oleh Dinas Ketahanan Pangan, 2) Kurangnya evaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, dan 3) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan.

BIBLIOGRAPHY

- Ansori, Muhammad. (2021). Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Lebak. *Jurnal Gizi Kerja Dan Produktivitas*, 2(2), 38–50.
- Ariani, Mewa, & Suryana, Achmad. (2023). Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 1–20.
- Arif, Sirajudin, Isdijoso, Widjajanti, Fatah, Akhmad Ramadhan, & Tamyis, Ana Rosidha. (2020). Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia. *Jakarta: SMERU Research Institute*.
- Fajar, Taufiqurrahman. (2023). *Analisis Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Di Indonesia*. Universitas Hasqanuddin.
- Fauzi, Nurmiftah, & Stiawati, Titi. (2024). Inovasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 52–70.
- Firdauzi, Indrawan. (2021). Analisa Pola Konsumsi Pangan Pokok Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2000-2014. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(1), 71–90.
- Gevisioner, Gevisioner, Febriamansyah, Rudi, Ifdal, Ifdal, & Tarumun, Suardi. (2015). Kualitas konsumsi pangan di daerah defisit pangan Provinsi Riau. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 10(3).
- Hardono, Gatoet S. (2014). Strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(1), 1–17.
- Heryanto, Mahra Arari, & Nugraha, Adi. (2022). Ketahanan pangan perkotaan, kemiskinan, dan Covid-19: Kasus Kota Bandung Urban Food Security, Poverty, and COVID-19: Case of Bandung City. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(2), 680–699.
- Isnaini, Maria. (2019). *Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Mansyur, Zulkifli. (2022). Peran Komando Kewilayahan Dalam Membantu Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan (Studi Kampung Moibaken Dan Kampung Suneri Di Kabupaten Biak Numfor). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 257–276.
- Mariyani, Siti, Prasmatiwi, Fembriarti Erry, & Adawiyah, Rabiatul. (2018). Ketersediaan pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 5(3).
- Pertahanan, Kementerian. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Pertanian, Departemen. (2005). *Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (RPPK)*. Departemen Pertanian Jakarta.
- Putranto, Kelik, & Taofik, Ahmad. (2014). Pola Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat Adat Kampung Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Istek*, 8(1).
- Rumawas, Virginia V, Nayoan, Herman, & Kumayas, Neni. (2021). Peran Pemerintah

- Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance, 1*(1).
- Sugiyanto, Sugiyanto, Nurhadi, Iwan, & Pintakami, Lintang Brilliant. (2022). Pemberdayaan dan Penanganan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat di Wilayah Kota Batu. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 6*(1), 199–208.
- Susanta, Sonia Aprilia. (2017). *Sikap Petani terhadap Program Gelar Lapang Inovasi Pertanian (GLIP) Berbasis Padi di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.*
- Sutrisno, Asep Dedy. (2022). Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13*(1), 28–42.
- Taenasah, Erna, Dasipah, Euis, & Gantini, Tuti. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Konsumsi Pangan di Kabupaten Garut (Suatu Kasus pada Rumah Tangga Peserta Program Pekarangan Pangan Lestari). *OrchidAgri, 4*(1), 34–47.
- Zebua, Orani. (2018). Pengaruh Sosial Ekonomi Petani terhadap Tingkat Pendapatan Petani Karet di Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias. *Warta Dharmawangsa, (57).*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).